

Representasi Woman Leadership dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia: Studi Perbandingan Illiza Sa'aduddin Djamal dan Sherly Tjoanda

Luthvia Buana Gultom¹, Nurul Kamaly², Imam Farisi³, M. Syakir⁴, Maghfira Faraidiany⁵

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Korespondensi : luthviabuana@gmail.com

Received: 20 April 2026 Revised: 22 April 2026 Accepted : 27 April 2026 Published: 30 April 2026

Abstract

Women's participation in politics in Indonesia continues to face various structural and cultural challenges rooted in patriarchal constructions from the New Order era to the Reform era. Although affirmative policies such as gender quotas have been implemented, women's political participation often remains symbolic and has not fully reflected substantive equality. In this context, it is important to examine how the representation of women's leadership is constructed across different social and cultural settings. This study aims to analyze and compare the representation of women's leadership in local government through the cases of Illiza Sa'aduddin Djamal in Banda Aceh and Sherly Tjoanda in North Maluku. The research employs a qualitative approach with a descriptive-comparative method, utilizing literature review and media analysis from relevant sources. The findings show that Illiza Sa'aduddin Djamal's leadership represents a negotiation between religious values and women's political roles, using a cultural approach that is socially acceptable but still limited to elite groups. Meanwhile, Sherly Tjoanda represents a more open model of women's leadership, where media and digital spaces play a significant role in shaping public perceptions of her leadership capacity. In conclusion, the representation of women's leadership remains caught between individual capacity and persistent gender constructions. Therefore, more inclusive and contextual approaches are needed to promote more substantive women's participation in local politics in Indonesia.

Keywords: *Feminism, Gender, Local Government, Political Representation, Women's Leadership.*

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang berakar dari konstruksi patriarki sejak masa Orde Baru hingga era reformasi. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan telah diterapkan, partisipasi perempuan dalam politik sering kali masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan substantif. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana representasi kepemimpinan perempuan terbentuk dalam berbagai latar sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan representasi kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah melalui studi kasus Illiza Sa'aduddin Djamal di Banda Aceh dan Sherly Tjoanda di Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif, melalui studi literatur dan analisis media terhadap berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal cenderung merepresentasikan negosiasi antara nilai religius dan peran politik perempuan, dengan pendekatan kultural yang lebih mudah diterima masyarakat, namun masih terbatas pada kalangan elit. Sementara itu, Sherly Tjoanda merepresentasikan kepemimpinan perempuan dalam konteks yang lebih terbuka, di mana media dan ruang digital berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kapasitas kepemimpinannya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa representasi kepemimpinan perempuan masih berada dalam tarik-menarik antara kapasitas individu dan konstruksi gender. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual guna mendorong partisipasi perempuan yang lebih substantif dalam politik lokal di Indonesia.

Kata kunci : *Kepemimpinan Perempuan, Representasi Politik, Pemerintahan Daerah, Feminisme, Gender*



Copyright © 2026 by Author. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License \(CC BY-SA\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Orde Baru, keterlibatan perempuan dalam politik cenderung terpinggirkan oleh agenda pembangunan yang dijalankan melalui kebijakan yang bersifat represif dan pragmatis. Walaupun terdapat kemauan politik Untuk mendirikan kementerian yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan peran perempuan, kebijakan tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka negara yang bercorak korporatis. Dalam konteks ini, perempuan memang diberi ruang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan sosial dan ranah politik, namun hanya terbatas pada peran-peran normatif semata (Bela Sabila Nina, 2025). Selain itu, kebijakan Orde Baru lebih menekankan posisi perempuan dalam lingkup pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Peran perempuan di masyarakat pun tetap dilekatkan pada identitasnya sebagai ibu, sehingga keterlibatan perempuan dalam politik kerap dianggap tidak lazim. Hal ini diwujudkan negara melalui pengorganisasian Perempuan yang ditampung secara resmi, seperti Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi (Subono et al., 2025).

Seiring bergulirnya era reformasi, perubahan dinamika politik tidak dapat diputuskan dari peran dan kontribusi perempuan dalam arena politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian dalam berbagai diskusi adalah keterwakilan perempuan dalam ajang politik elektoral, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung, seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) (Marwah, 2016). Pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan setelah kemerdekaan pada Pada prinsipnya bertujuan untuk mendorong peningkatan kemakmuran penduduk dalam berbagai bidang. Pada ranah politik, pembangunan tersebut diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang. Salah satu kelompok yang masih memiliki tingkat partisipasi politik yang relatif sedikit ialah Perempuan (Rahmawati & Ummah, 2023).

Sebaliknya, permasalahan keikutsertaan perempuan pada politik secara substansial masih meninggalkan berbagai catatan. Peningkatan jumlah secara kuantitatif belum sejalan dengan kualitas peran dan fungsi dalam kedudukan politik yang dijalankan oleh perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam politik juga kerap berkaitan dengan dinasti politik, yang menunjukkan bahwa perempuan sering dijadikan sebagai perkakas untuk pemanfaatan beberapa kelompok. Dampaknya, kemandirian perempuan dalam posisi jabatan cenderung bersifat simbolis. Selain itu, indeks inovasi Daerah menunjukkan bahwa kepemimpinan Perempuan di beberapa tempat masih kurang inovatif (Rahmawati & Ummah, 2023). Saat ini, beberapa daerah di Indonesia dipimpin oleh Perempuan, salah satunya adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Illiza Sa'aduddin (Walikota Banda Aceh), dan Airin Rachmi (Walikota Tangerang Selatan). (Lorita et al., 2023). Kehadiran para pemimpin perempuan tersebut dapat dipandang



sebagai tolok ukur penting dalam menilai perkembangan representasi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia, terutama pada level pemerintahan daerah.

Dalam kerangka kajian *Representasi Woman Leadership dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia: Studi Perbandingan Illiza Sa'aduddin Djamal dan Sherly Tjoanda*, fenomena ini menjadi semakin signifikan untuk ditelaah secara mendalam. Illiza Sa'aduddin Djamal mencerminkan model kepemimpinan perempuan yang berkembang dalam lingkungan sosial budaya Aceh yang sarat dengan nilai religius serta penerapan syariat Islam. Di sisi lain, Sherly Tjoanda merepresentasikan figur kepemimpinan perempuan dengan latar belakang dan karakter yang berbeda, sehingga menghadirkan sudut pandang komparatif yang menarik dalam memahami praktik kepemimpinan perempuan di ruang publik.

Perbandingan kedua tokoh tersebut tidak hanya menunjukkan keragaman gaya kepemimpinan perempuan, tetapi juga mengungkap peran faktor sosial, budaya, dan politik lokal dalam membentuk sekaligus memengaruhi penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-komparatif, yang bertujuan untuk memahami dan membandingkan representasi kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah di Indonesia melalui studi kasus pada Illiza Sa'aduddin Djamal dan Sherly Tjoanda. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, konteks sosial, serta konstruksi representasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini dilakukan secara non-lapangan (*library research*) dengan fokus pada dua wilayah kajian, yaitu Kota Banda Aceh dan Provinsi Maluku Utara sebagai representasi konteks sosial yang berbeda. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025–2026, dengan pengumpulan data yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh informasi, wacana, dan representasi terkait kepemimpinan perempuan di Indonesia. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu memilih dua tokoh perempuan kepala daerah, Illiza Sa'aduddin Djamal dan Sherly Tjoanda, sebagai subjek utama karena dianggap representatif dalam menggambarkan variasi konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui: 1. Studi dokumentasi, berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta berita media online yang relevan dengan topik penelitian. 2. Analisis media, khususnya pemberitaan digital dan media sosial yang membahas kedua tokoh sebagai bagian dari konstruksi representasi publik. 3. Literatur

pendukung, yang mencakup teori representasi, feminisme (liberal, interseksional, dan kultural), serta kajian gender dan politik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif yang meliputi tiga tahap, yaitu: 1. Reduksi data, dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, 2. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif dan komparatif untuk melihat perbedaan serta persamaan antara kedua tokoh, 3. Penarikan kesimpulan, dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori representasi dan feminisme. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan media online. Selain itu, digunakan juga triangulasi teori, dengan mengkaji data melalui berbagai perspektif teori feminisme dan representasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi merupakan unsur krusial dalam proses pertukaran makna antar budaya yang melibatkan penggunaan Bahasa, simbol, serta citra untuk menggambarkan atau mewakili sesuatu. Selanjutnya, Hall menjelaskan bahwa representasi adalah proses memberikan makna Bahasa kepada ide-ide yang ada dalam pikiran melalui pikiran seseorang. Ini adalah hubungan antara konsep dan bahasa inilah yang memungkinkan manusia guna merujuk kepada dunia “nyata” yang terdiri atas objek, personal dan peristiwa, maupun pada dunia imajiner yang mencakup hal-hal fiktif (Ayuanda et al., 2024). Peran perempuan sebagai warga negara kerap direpresentasikan terutama sebagai ibu dan istri. Akibatnya, peran lain di luar konstruksi tersebut seperti sebagai pekerja atau pencari nafkah utama tidak menjadi prioritas dan cenderung ditempatkan di posisi sekunder. Hak-hak perempuan pun kemudian disesuaikan dengan representasi ini, sehingga mereka lebih sering diposisikan bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai pendamping (istri), asisten (sekretaris), atau pengelola urusan domestik dan sosial seperti konsumsi dan kegiatan PKK.

Hubungan antara representasi perempuan dalam bentuk peraturan daerah dengan dampaknya terhadap kehidupan politik perempuan. Hal ini mencakup tidak hanya akses perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik, tetapi juga berbagai kewajiban lain yang dilekatkan pada perempuan sebagai warga negara, khususnya terkait peran di ranah domestik dan komunitas. Partisipasi perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang rumit saat berpartisipasi dalam politik. Kebijakan kuota keterwakilan Perempuan ialah 30% yang pada kenyataannya lebih banyak memberikan keuntungan bagi kelompok perempuan elit. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari pendekatan yang bersifat tunggal, yang kurang mempertimbangkan faktor perbedaan kelas sosial dan latar belakang etnis.

Kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, karena manfaatnya cenderung dirasakan oleh perempuan yang memiliki akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan pendidikan yang lebih baik. Di sisi lain, perempuan dari kelompok marjinal seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan atau berasal dari wilayah dengan budaya patriarki yang kuat masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghalangi keterlibatan mereka secara setara dalam politik (Lestari, P., & Kurniawan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum optimal dalam memberdayakan perempuan di tingkat lokal, khususnya bagi kelompok kelas menengah ke bawah dan masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan keagamaan tertentu yang cenderung mempertahankan nilai-nilai konservatif. Dalam konteks Aceh, dinamika politik sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki serta penafsiran agama yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih subordinat. (Lestari, P., & Kurniawan, 2025)

Nilai-nilai religius dan praktik spiritual yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia turut membentuk batas-batas simbolik yang memengaruhi ruang gerak perempuan di ranah publik. Dari perspektif antropologis, wacana keagamaan kerap memperkuat hierarki gender dengan menempatkan perempuan lebih dekat pada wilayah moral dan domestik. Temuan ini sejalan dengan realitas yang dihadapi perempuan di Aceh, yang harus mampu menegosiasikan antara identitas keagamaan dan peran politik yang dijalankannya. Oleh karena itu, keberhasilan upaya afirmasi gender sangat bergantung pada terbukanya ruang dialog publik yang setara, dengan mengedepankan prinsip demokrasi deliberatif guna mendorong terwujudnya transformasi sosial yang nyata.



Gambar 1. Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh

Kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh pascakonflik menunjukkan adanya representasi simbolik perempuan di ruang publik yang sarat dengan nilai-nilai syariat Islam. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan

perempuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, penerimaan sosial terhadap perempuan sebagai pemimpin masih cenderung terbatas pada dimensi moral semata dan belum mampu menggeser dominasi struktur patriarki dalam politik lokal. Dari sudut pandang feminisme (Azzahra, 2025).

Dalam perspektif feminisme liberal, keberhasilan Illiza Sa'aduddin Djamal mencerminkan capaian individu dalam menembus batasan-batasan gender. Sementara itu, dalam pandangan feminisme interseksional, posisi yang diraih Illiza tidak terlepas dari pengaruh modal sosial, tingkat pendidikan, serta dukungan politik yang dimilikinya. Dengan demikian, kepemimpinannya belum sepenuhnya merepresentasikan perjuangan perempuan akar rumput, melainkan lebih menggambarkan keberhasilan kelompok elit perempuan yang mampu beradaptasi dengan sistem politik yang masih berlangsung (Azzahra, 2025).

Kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh periode 2025–2030 menunjukkan kembalinya figur perempuan dalam posisi strategis di daerah yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariat Islam. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai wali kota pada periode 2014–2017, dan pada tahun 2025 kembali terpilih bersama wakilnya Afdhal, sebagaimana diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Azzahra, 2025).

Namun demikian, penerimaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan di Aceh masih cenderung terbatas pada aspek moral dan belum secara signifikan mengubah struktur patriarki dalam politik lokal. Dari sudut pandang feminisme liberal, keberhasilan Illiza mencerminkan kemampuan individu dalam menembus batasan gender. Sementara itu, perspektif feminisme interseksional melihat bahwa posisinya juga dipengaruhi oleh faktor modal sosial, tingkat pendidikan, serta dukungan politik, termasuk dari partai berbasis Islam. Oleh karena itu, kepemimpinan Illiza lebih menggambarkan keberhasilan perempuan dari kalangan elit yang mampu beradaptasi dengan sistem politik yang masih maskulin, dibandingkan sebagai representasi menyeluruh dari perjuangan perempuan akar rumput (Azzahra, 2025).

Konsep interseksionalitas dalam feminisme menjelaskan bahwa ketimpangan gender tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari perpotongan berbagai faktor sosial seperti kelas, agama, etnis, dan budaya. Dalam konteks Banda Aceh, perempuan kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses ruang publik akibat norma sosial yang menekankan peran domestik. Perempuan dari kelompok marjinal seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan, berasal dari wilayah terpencil, atau merupakan bagian dari minoritas etnis dan agama mengalami hambatan berlapis. (Azzahra, 2025)

Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari struktur politik yang patriarkal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kelas sosial, budaya lokal, serta nilai-nilai keagamaan yang membatasi akses perempuan terhadap ruang publik dan kekuasaan politik (Lestari & Kurniawan, 2025). Dalam hal ini, kendala yang dihadapi perempuan juga berkaitan erat dengan tatanan sosial dan nilai religius yang cenderung konservatif. (Azzahra, 2025) Illiza Sa'aduddin Djamal berupaya melakukan negosiasi identitas antara nilai-nilai Islam dan peran kepemimpinan perempuan dengan menonjolkan pendekatan moral dan religius. Strategi ini sejalan dengan perspektif feminisme kultural, yang menekankan perubahan melalui reinterpretasi nilai-nilai lokal, alih-alih melalui pendekatan konfrontatif. Pendekatan tersebut memungkinkan kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal lebih mudah diterima oleh masyarakat, namun tetap menghadapi kendala dalam mengubah cara pandang tradisional yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik. Penerapan demokrasi deliberatif dapat menjadi alternatif untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik lokal. Melalui ruang dialog publik yang inklusif dan partisipatif, perempuan memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan sosial tanpa harus berhadapan secara langsung dengan budaya patriarki yang mengakar (Azzahra, 2025)

Dalam praktik kepemimpinannya, Illiza Sa'aduddin Djamal menggagas berbagai forum musyawarah perempuan serta program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM yang melibatkan ibu rumah tangga dan aktivis lokal. Upaya ini menjadi wujud pengarusutamaan gender yang kontekstual, selaras dengan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh. Transformasi struktural menuju kesetaraan gender perlu mempertimbangkan keberagaman pengalaman perempuan dari berbagai latar kelas dan komunitas. Dengan mengedepankan pendekatan kultural dan dialogis, feminisme dapat diadaptasi secara lebih kontekstual guna mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan karakter konservatif seperti Banda Aceh (Azzahra, 2025).

Dalam ranah politik lokal, karakter seperti ketegasan, keberanian, dan kewibawaan kerap dijadikan tolok ukur kepemimpinan yang ideal karena dibentuk oleh nilai-nilai yang identik dengan maskulinitas. Para sarjana feminis menyebut kondisi ini sebagai "double bind", yakni situasi ketika perempuan yang tampil tegas dianggap terlalu agresif, sedangkan yang bersikap lembut dinilai tidak cukup pantas untuk memimpin. Pertentangan antara harapan berbasis gender dan tuntutan kepemimpinan ini sering kali muncul saat perempuan terlibat dalam dunia politik (Zempi et al., 2023).

Secara politik maupun akademis, terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2024 menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Selain mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin provinsi tersebut, kehadirannya juga menonjol dalam konteks Indonesia Timur, kawasan yang relatif minim perhatian dalam kajian gender dan politik. Kemenangannya terjadi di tengah dominasi laki-laki dalam politik lokal Maluku Utara, di mana faktor kekerabatan, relasi

kekuasaan, serta norma sosial turut membentuk cara masyarakat menilai seorang pemimpin. Di sisi lain, representasi Sherly Tjoanda di media digital berkembang menjadi ruang yang potensial untuk mengamati bagaimana norma gender dipertahankan, dinegosiasikan, bahkan dipertanyakan dalam wacana publik kontemporer (Aulia et al., 2026).



Gambar 2. Sherly Tjoanda Gubernur Maluku Utara

Pemberitaan media online mengenai Sherly Tjoanda merefleksikan bagaimana kepemimpinan perempuan direpresentasikan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Munculnya Sherly sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara menandai peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang politik lokal yang selama ini didominasi laki-laki. Media tidak hanya menyoroti perjalanan politiknya, tetapi juga membingkai kehadirannya sebagai simbol perubahan dalam struktur kepemimpinan daerah (Aulia et al., 2026). Dalam perspektif representasi, media cenderung menggambarkan Sherly melalui dua dimensi utama, yaitu identitas gender dan kapasitas kepemimpinan.

Di satu sisi, ia ditampilkan sebagai perempuan yang berhasil menembus batas-batas patriarki, sementara di sisi lain tetap dinilai berdasarkan kinerja, kebijakan, dan kemampuan memimpin pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa representasi kepemimpinan perempuan di tingkat daerah tidak terlepas dari konstruksi sosial tentang gender yang masih melekat dalam penilaian publik (Aulia et al., 2026). Selain itu, kehadiran media sosial memperkuat dinamika representasi tersebut. Respons publik yang beragam mulai dari dukungan, apresiasi, hingga kritik mencerminkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya dinilai dari aspek profesional, tetapi juga dari citra personal dan gaya komunikasi. Interaksi ini memperlihatkan bahwa ruang digital menjadi arena penting dalam membentuk persepsi terhadap perempuan pemimpin di Indonesia. Dari sisi framing, pemberitaan media terhadap Sherly juga menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan orientasi pada kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Narasi ini secara

tidak langsung memperkuat stereotip bahwa perempuan lebih dekat dengan isu-isu sosial, sekaligus menunjukkan kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan daerah. (Aulia et al., 2026)

Dengan demikian, representasi woman leadership dalam pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam figur Sherly Tjoanda, menunjukkan adanya pergeseran menuju inklusivitas politik. Namun, representasi tersebut masih berada dalam tarik-menarik antara pengakuan atas kapasitas kepemimpinan dan konstruksi gender yang membentuk cara publik serta media memaknai perempuan sebagai pemimpin (Aulia et al., 2026). Perbandingan antara kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal dan Sherly Tjoanda menunjukkan dinamika representasi kepemimpinan perempuan dalam konteks yang berbeda di Indonesia. Illiza tampil dalam lingkungan sosial-religius yang kuat dengan nilai syariat Islam, sehingga kepemimpinannya lebih bersifat simbolik dan kultural melalui pendekatan moral serta religius untuk memperoleh legitimasi publik. Meski diterima, posisinya masih dibatasi oleh struktur patriarki dan lebih merefleksikan keberhasilan perempuan elit dengan dukungan modal sosial dan politik.

Sebaliknya, Sherly hadir dalam konteks politik yang lebih terbuka di Indonesia Timur, dengan representasi yang banyak dibentuk oleh media dan ruang digital. Ia tidak hanya dilihat sebagai simbol perempuan dalam politik, tetapi juga sebagai figur yang dinilai melalui kinerja, citra publik, serta interaksi di media sosial. Jika Illiza menegosiasikan kepemimpinan perempuan melalui nilai agama dan budaya lokal, maka Sherly menunjukkan bagaimana kepemimpinan perempuan dinegosiasikan melalui media, popularitas, dan framing publik. Keduanya sama-sama menghadapi "double bind" dalam ekspektasi gender, namun dalam konteks yang berbeda: Illiza lebih pada legitimasi normatif-religius, sedangkan Sherly pada persepsi publik dan citra digital dalam politik kontemporer.

4. KESIMPULAN

Representasi kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, namun belum sepenuhnya lepas dari pengaruh struktur patriarki, norma budaya, dan konstruksi gender yang kuat. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% telah meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitatif, kualitas partisipasi dan kemandirian politik perempuan masih menghadapi berbagai kendala.

Studi komparatif antara Illiza Sa'aduddin Djamal dan Sherly Tjoanda memperlihatkan bahwa konteks sosial, budaya, dan media sangat memengaruhi bentuk dan penerimaan kepemimpinan perempuan. Illiza merepresentasikan kepemimpinan yang berbasis negosiasi nilai religius dan budaya lokal, namun cenderung bersifat simbolik dan terbatas pada elit. Sebaliknya, Sherly menunjukkan dinamika

kepemimpinan perempuan yang lebih terbuka, tetapi tetap dipengaruhi oleh framing media dan ekspektasi publik. Dengan demikian, upaya mendorong kesetaraan gender dalam politik tidak hanya memerlukan peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan publik, tetapi juga perubahan struktural dan kultural yang mendukung partisipasi perempuan secara substantif. Pendekatan dialogis, inklusif, dan kontekstual menjadi kunci dalam menciptakan ruang politik yang lebih adil dan setara bagi perempuan di Indonesia

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D. F., Rismayani, A., & Indriyany, I. A. (2026). Framing Gender dalam Politik Digital : Representasi Kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam Pemberitaan dan Platform Sosial mempelajari bagaimana norma gender dipertahankan , dinegosiasikan , atau bahkan. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 5(1), 64–81.
- Ayuanda, W., Sidabalok, D., & Perangin-angin, A. B. (2024). Budaya Jawa dalam Film Primbon : Analisis Representasi Stuart Hall. *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 7, 440–449.
- Azzahra, A. (2025). *Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Kepemimpinan Pilkada di Indonesia melalui Perspektif Teori Feminisme Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh dan Implikasi Keterwakilan Gender*. State University of Semarang.
- Bela Sabila Nina, M. (2025). Kebijakan Pemerintah Terhadap Gerakan Perempuan Indonesia Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Sangkala*, 4(2), 61–70.
- Lestari, P., & Kurniawan, G. F. (2025). Intersectionality and Political Representation: Challenges and Policy Implications for Marginalized Women in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 16(2), 1–38.
- Lorita, E., Endang, A., & Risdiyanto, B. (2023). Kiprah Perempuan Pemimpin Di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 249–254.
- Marwah, S. (2016). Jurnal Politik Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015 Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.1122>
- Rahmawati, A. D., & Ummah, K. C. (2023). Representasi Kepemimpinan Klebun Perempuan di Madura : Upaya Menuju Kepemimpinan Perempuan Mandiri. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 174–183.
- Subono, N. I., Arivia, G., Wiguna, F. A., & Saragih, G. S. (2025). Melawan Kekerasan Negara: Peran LSM Perempuan Daerah pada Masa Orde Baru. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 30(1), 35–48.
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Marya, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam



Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116-123.